

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1496, Kerajaan Aceh sendiri merupakan penggabungan kerajaan kecil dari sepanjang daerah utara hingga barat Aceh (Sunny, 1980). Kerajaan Aceh bahkan termasuk sebagai salah satu dari lima kerajaan Islam terbesar pada masa itu. Empat kerajaan besar selain kerajaan Aceh yaitu Kerajaan Turki Utsmaniyah di Istanbul, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfaham di Timur Tengah, dan Kerajaan Islam Ikra di India. Pada abad ke-16M, dengan banyaknya para pedagang dari luar yang meramaikan Selat Malaka memberikan banyak keuntungan bagi Kerajaan Aceh sendiri. Dalam segi finansial memberikan banyak pundi pundi bagi Kasultanan Aceh sendiri. Selain itu dalam segi politik memberikan pandangan yang baik dan semakin membuat kerajaan Aceh terkenal di internasional sebagai Kerajaan Islam besar yang disegani dunia internasional.

Awal pengenalan Aceh di dunia terjadi ketika adanya pasar dagang internasional oleh orang Arab dan Eropa yang mana barang-barang tersebut terdiri dari rempah-rempah, belerang, kapur barus, bahkan emas yang merupakan komoditas dari Aceh itu sendiri. Bangsa luar dapat mengetahui orang Aceh ini karena bangsa Aceh sendiri sudah lama menjadi pelaut yang handal. Mereka menjadikan bintang-bintang sebagai acuan untuk mengarungi lautan. Perpindahan yang dilakukan oleh orang Aceh ke Malagasi (Maladewa) jauh berabad-abad sebelum masehi semakin memperkuat pengetahuan bahwa kemampuan melaut nenek moyang kita tidak perlu diragukan.

Ada catatan yang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Alexander the Great, Beliau pernah bertemu dengan pelaut Aceh di sungai Indus yang terletak di India secara berkala. Dan dicatat juga pada pertengahan abad ke-1 masehi pernah ada orang Aceh

mengunjungi Romawi dan menghadap Kaisar Claudius, selain itu catatan dari Idrisi pada abad 10 masehi mengatakan bahwa ia melihat pelaut Aceh di Madagaskar semakin memperkuat fakta bahwasanya orang-orang yang pindah ke Madagaskar adalah orang Aceh. Ada petunjuk yang mengatakan bahwa bangsa Aceh pernah menjadi *partner* dagang dinasti China pada masa Dinasti Han yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Wang Mang (1-6 M). Kaisar Wang Mang mengirimkan bingkisan berupa mutiara dan perhiasan lainnya ke suatu daerah yang tercatat bernama Huang Che, banyak ahli yang berpendapat bahwa Huang Che yang terdapat dicatatan Dinasti Han yang berjudul Tsien Han-Shu adalah bangsa Aceh (said, 1981).

Kesultanan Aceh Darussalam juga membangun hubungan diplomasi dengan banyak negara bukan hanya Asia tetapi juga Eropa. Seperti halnya dengan negara Inggris, Ratu Elizabeth yang mengirim surat kepada Sultan Alauddin Syah yang memimpin pada masa itu lewat Sir James Lancaster yang merupakan *commandore* Inggris, lalu hubungan Kesultanan Aceh Darussalam dengan Prancis, karena Kesultanan Aceh Darussalam memiliki diplomat Aceh yang berada di Prancis yang bernama Sidi Muhammad yang merupakan putra asli Pidie yang sering mengirim surat dari Raja Louis Philippe untuk Sultan Aceh. Hubungan tersebut juga terus terjalin pada masa Raja Napoleon III dengan Sultan Aceh. Selain Negara-negara tersebut, masih banyak negara-negara yang melakukan hubungan diplomasi dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Dan saat itu Kesultanan Aceh Darussalam merupakan Negara berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada tahun 1602 sebagai satu entitas politik (Bakri, 2013).

Awal abad 16, Negara Belanda mencoba melepaskan diri dari jajahan Spanyol. Pangeran Maurits memproklamakan Belanda sebagai Negara yang berdaulat. Akibat dari pernyataan tersebut pula membuat pecahnya perang di Negara Belanda antara rakyat Belanda sendiri dengan Spanyol (Tengkuputeh, 2017). Pada waktu itu kekuatan Spanyol sangat kuat sehingga tidak ada negara di Eropa yang berani mengakui kedaulatan Belanda sehingga

membuat Prince Maurits selaku Pemimpin mencoba pergi ke Asia guna mencari dukungan. Prince Maurits memilih untuk berdiplomasi dengan Kasultanan Aceh Darussalam yang merupakan salah satu super power pada masa itu.

Pada 23 Agustus 1601, Rombongan Belanda yang dipimpin oleh Gerard De Roy dan Laksamana Lauren Bicker tiba di Aceh dengan 4 kapal rombongan, maksud dari kedatangan Belanda sendiri atas perintah dari Prince Maurits, kedatangan rombongan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hadiah dan sepucuk surat kepada Sultan Alauddin Riayat Syah Saidi Mukammil, Surat ini sendiri berisi tentang penyesalan Prince Maurits atas perilaku buruk yang dilakukan oleh oknum-oknum Belanda yang berkelakuan buruk di Aceh dan Prince Maurits sendiri bermaksud memperbaiki hubungan dengan Aceh dan bersedia membayar ganti rugi atas kelakuan oknum Belanda dan memberi berbagai hadiah. Hal ini pun mendapat respon yang sangat baik dari Kasultanan Aceh Darussalam sehingga Aceh pun mengirim utusan untuk mengunjungi Belanda. Surat Prince Maurits sendiri ditemukan pada tahun 1974 (Matapadi.com, 2017).

Yang menarik dari pembahasan ini adalah tujuan utama skripsi ini untuk memberitahu sejarah yang belum banyak diketahui oleh bangsa Indonesia, bahkan bangsa Aceh sendiri sehingga Penulis mencoba untuk membuka sejarah yang tertutup tersebut dan dikaji dalam sebuah penelitian guna mempermudah memberikan informasi ke khalayak ramai. Yang mana sejarah tersebut berisi tentang berdirinya suatu Kasultanan yang besar di Indonesia yaitu Kasultanan Aceh Darussalam dan bagaimana hubungan diplomasi yang dilakukan oleh Kasultanan Aceh Darussalam sebagai Kerajaan pertama yang mengakui kedaulatan Negeri Belanda.

Dari paparan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Kasultanan Aceh Darussalam untuk skripsi yang berjudul “Pengakuan Kasultanan Aceh Darussalam terhadap kemerdekaan Negeri Belanda pada tahun 1602”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan diatas, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
Mengapa Kasultanan Aceh Darussalam mengakui kedaulatan Negeri Belanda pada tahun 1602?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas dan menjawab rumusan masalah diatas, Penulis menggunakan dua kerangka pemikiran. Yakni Teori Geo Politik , dan Teori *Recognition*.

Diplomasi memiliki arti yakni suatu alat yang dapat digunakan demi tujuan-tujuan tertentu. Terutama untuk menjaga kedamaian antar Negara. Dari Diplomasi lah tiap-tiap negara dapat membentuk suatu kerjasama dan memperkecil resiko permasalahan antar negara. Seperti yang dikatakan oleh Reza tahun 2015 bahwa tujuan utama dibentuknya sebuah Diplomasi adalah untuk menciptakan *World Peace*, yang artinya membentuk kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Dunia (UMY, 2015).

1. Teori Geo Politik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *Geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik berasal dari kata *Polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Dengan kata lain Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Dalam perkembangan pemikiran tentang geopolitik, telah muncul banyak definisi dengan beraneka ruang lingkup, pembatasan dan lain sebagainya yang dapat memberikan pemahaman yang berlainan. Menurut Dorpalen, *Geopolitic is the science of the earth's*

relationship of political processes (Geopolitik adalah ilmu pengetahuan tentang bumi yang berhubungan dengan proses politik) (Dorpalen, 1942). Sedangkan menurut Webster, Geopolitik adalah suatu pelajaran dari suatu faktor fisik seperti geografi, ekonomi, penduduk dan politik khususnya kebijakan luar negeri dari suatu Negara. Spykmen memberikan pengertian geopolitik yakni, geopolitik adalah perencanaan dari keamanan Negara yang berkaitan dengan faktor geografi (Suwondo, 2008).

Geo politik bisa diartikan sebagai hubungan antara suatu politik dan wilayah teritori yang merupakan sistem politik yang merupakan strategi dimana kepentingannya berfokus kepada wilayah teritori tersebut untuk mencapai tujuan utamanya (bamuzaham, 2018). Selain itu geo politik juga mempelajari tentang potensi suatu bangsa untuk menjadi sebuah kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan negara tersebut (Suradinata, 2001). Teori Geopolitik menurut Fredefich Ratzel, menyebutkan bahwa: Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim). Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewartakan tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi.

Selanjutnya, Kekuatan suatu negara harus mampu mewartakan pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Suatu bangsa dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Dan yang terakhir adalah apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang (Dwi Sulisworo, 2012).

2. Teori *Recognition*

Recognition atau pengakuan dalam hukum internasional termasuk suatu hal yang sangat penting dalam hubungan antar Negara. Tidak ada Negara yang dapat bertahan tanpa bantuan Negara lain atau terasing dari Negara lain. Berbagai kepentingan mendorong terciptanya hubungan yang erat antar Negara – Negara. Sebelum suatu Negara dapat mengadakan hubungan dalam berbagai bidang dengan Negara- Negara lainnya, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya maka harus didahului oleh pengakuan. Pengakuan disini berfungsi sebagai alat untuk menjamin sebuah Negara mendapat tempat yang pantas dalam suatu organisme politik di tengah kehidupan bernegara dan dapat melakukan hubungan antar Negara dengan Negara lainnya tanpa mengkhawatirkan posisi kedaulatannya, (PROF. DR. NOOR, 2012).

Diplomasi *recognition* merupakan diplomasi dalam memperjuangkan atau mencari pengakuan sebagai sebuah Negara yang berdaulat. Untuk diakui sebagai sebuah Negara maka wilayah tersebut harus memiliki rakyat atau sumber daya manusia yang mempunyai dan terorganisir dengan baik, memiliki wilayah atau sumber daya alam untuk hidup masyarakat atau penduduk, kekuatan politik untuk berdiri sebagai sebuah Negara yang berdaulat, dan memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan Negara lain, (A. Masyhur Effendi, 2011).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritik tersebut, Penulis mengajukan hipotesis yakni, Kasultanan Aceh Darussalam mengakui kedaulatan Negeri Belanda pada tahun 1602 karena untuk :

1. Menjadikan Belanda koalisi strategis Kesultanan Aceh Darussalam dalam menjaga dan mempertahankan pengaruhnya di Selat Malaka
2. Menjadikan Negeri Belanda sah untuk berdiri sebagai Bangsa yang merdeka

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif sendiri adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber terpercaya dan teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dari literatur tentang Kasultanan Aceh Darussalam dan dokumen-dokumen sejarah yang ada.

Selain itu metode dokumentasi juga di gunakan di penelitian ini , metode ini menelusuri jejak historis dengan menggunakan literatur yang banyak tersedia bisa juga dari internet dan lain nya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sejarah masa lalu dan besarnya kedudukan Kasultanan Aceh Darussalam dimata dunia sebagai salah satu dari 5 *super power* pada masa itu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberitahu hal-hal yang tersimpan di masa lalu bahwasanya Kasultanan Aceh Darussalam yang menjadi Negara

pertama yang mengakui kedaulatan Negeri Belanda yang mana Negeri Belanda sendiri pada masa itu masih menjadi jajahan Spanyol.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi pembaca yang belum mengetahui tentang Kasultanan Aceh Darussalam, dan menjadi informasi betapa kuatnya bangsa Indonesia dahulu.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari penelitian ini pembaca bisa mengambil manfaat yakni, Percaya dengan kekuatan dan kemampuan tiap individu yang ada di Indonesia ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang Pendahuluan

BAB II Berisi tentang pemahaman lebih mendalam terkait Kasultanan

Aceh Darussalam dan diplomasinya terhadap Negara lain serta berisi tentang sejarah Negeri Belanda, perjuangan kemerdekaan Belanda dan deklarasi kemerdekaan Belanda

BAB III Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV Berisi tentang kesimpulan